

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata I pada
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun oleh :

ABDI SUSILO

B300 080 015

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

ABDI SUSILO

B300 080 015

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Surakarta, 06 Januari 2017

Dosen Pembimbing



(Dr. Daryono Subagyo, Mec.)

HALAMAN PENGESAHAN

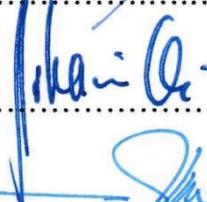
**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Yang ditulis oleh:
ABDI SUSILO
B300 080 015**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Senin, 26 Januari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Dr. Daryono Subagyo, Mec.
(Ketua)
2. Maulidah IH., Ir,MS.
(Sekretaris)
3. Muhammad Arif, Se. M,ec.
(Anggota)


(.....)

(.....)

(.....)

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



(Dr. Syamsudin, M.M.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Januari 2018



Abdi Susilo
B300 080 015

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH
ABSTRAKSI**

Penelitian yang berjudul “analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten di provinsi jawa tengah” mempunyai tujuan menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten di provinsi jawa tengah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu gambaran pembangunan diberbagai sektor ekonomi, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Metode yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah analisis *Tipologi klassen dan Index Williamson*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan analisis Tipologi Klassen antar kabupaten di provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa klasifikasi, *daerah cepat maju* dan *cepat tumbuh*, *daerah berkembang cepat*, Kemudian daerah yang masuk dalam *daerah maju tapi tertekan* dan *daerah tertinggal*.

Hasil penelitian periode 2011-2015 ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten di Jawa tengah dengan analisis Index williamson menunjukkan angka ketimpangan pada awal periode cenderung terjadi penurunan. Indeks Williamson dengan angka diatas 0,4 menunjukkan bahwa kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah masuk dalam wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, tingginya ketimpangan ini salah satunya di sebabkan oleh konsentrasi aktivitas ekonomi di salah satu wilayah yaitu pada Kota Semarang.

Kata Kunci:*Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan pendapatan*

Abstract

The research entitled "analysis of economic growth and inequality of income distribution between districts in central java province" has the purpose of analyzing economic growth and inequality income distribution between districts in central Java province economic growth is one of the picture of development in various economic sectors, with the aim of increasing the income of the community and overcome the level of economic inequality and social inequality.

The method used to analyze economic growth and income inequality in this research is the analysis of Typology Klassen and Index Williamson. The results showed that according to economic growth and income per capita with Klassen Tipologi analysis between districts in Central Java province divided into several classification, fast forward and fast growing area, fast growing area, Then area entering forward but depressed region and lagging area.

The results of the 2011-2015 period of inequality of income distribution between districts in Central Java with Williamson Index analysis show the rate of inequality at the beginning of the period tend to decrease. Williamson index with a number above 0.4 indicates that the district / city of Central Java province into the region with high income imbalance, high inequality is one of them caused by the concentration of economic activity in one region that is in the city of Semarang.

Keywords: Economic growth, income imbalance

1. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian sasaran yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan direalisasikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu perhatian dalam penyusunan perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya hasilnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini berarti diperlukan suatu model perencanaan yang dapat mengidentifikasi atas keunggulan maupun kelemahan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah (Tarigan, 2004).

Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pembangunan daerah untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki guna mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) serta dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi wilayah yang bersangkutan. Adanya permasalahan dalam pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999/Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Kedua undang-undang tersebut, memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya pemberian urusan, sumber daya manusia dan pembiayaan, yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Objek Penelitian

Penelitian ini terkait dengan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* selama tahun 2011 – 2015 dan data *cross section* dari 35 kabupaten/kota. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah *trend* perkembangan pembangunan ekonomi tiap kabupaten/kota, serta ketimpangan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Jenis dan Sumber Data

2.2.1 Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2011-2015. Data yang digunakan adalah:

- a. PDRB Propinsi Jawa Tengah ADHB periode tahun 2011-2015.
- b. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ADHB periode tahun 2011-2015.
- c. PDRB Perkapita Propinsi Jawa Tengah ADHB periode tahun 2011-2015
- d. PDRB Perkapita Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ADHB periode 2011-2015.
- e. Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015
- f. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

2.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber sekunder. Sumber data skunder diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah berupa PDRB Propinsi Jawa Tengah ADHB periode tahun 2011-2015 serta PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ADHB periode tahun 2011-2015.

2.3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif melalui pendekatan basis ekonomi dan analisis kuantitatif dengan statistik. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Model Tipologi Klassen

Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah (Syafrizal, 2012).

Melalui pendekatan sektoral, analisis Tipologi Klassen merupakan perpaduan antara alat analisis LQ dengan Model Rasio Pertumbuhan. Sektor ekonomi di tiap kabupaten/kota yang memiliki karakteristik pertumbuhan dan pangsa yang berbeda-beda dapat diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan sektoral.

Tabel 3.1
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral/Daerah

PDRB Per Kapita (X) Pertumbuhan (ΔX)	$X_i < X$	$X_i \geq X$
$\Delta X_i \geq X$	III Daerah Berkembang Cepat	I Daerah Maju dan Cepat Tumbuh
$\Delta X_i < X$	IV Daerah Relatif Tertinggal	II Daerah Maju tapi Tertekan

Klasifikasi daerah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu :

- a. Kuadran I (pertama) yaitu daerah/kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

- b. Kuadran II (kedua) yaitu daerah/kecamatan yang berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi PDRB perkapitanya lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah.
- c. Kuadran III (ketiga) yaitu daerah atau kecamatan maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi PDRB per-kapita lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah.
- d. Kuadran IV (keempat) yaitu daerah/kecamatan relatif tertinggal (*low growth low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapitanya lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah.

2.3.2 Analisis Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

3.1.1 Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relative tertinggal (*low growth and low income*).

Rata-rata pertumbuhan ekonomi serta rata-rata PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Rata-rata Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita (Rupiah)	
Wilayah	2011-2015	2011-2015
PROVINSI JAWA TENGAH	10.06	25,194,033
Kabupaten Cilacap	5.74	51,733,183
Kabupaten Banyumas	11.02	19,855,028
Kabupaten Purbalingga	11.16	17,130,530
Kabupaten Banjarnegara	10.93	14,606,552
Kabupaten Kebumen	11.03	14,412,105
Kabupaten Purworejo	10.22	16,444,547
Kabupaten Wonosobo	9.47	15,547,774
Kabupaten Magelang	10.94	16,275,179
Kabupaten Boyolali	11.42	20,155,933
Kabupaten Klaten	11.27	20,757,652
Kabupaten Sukoharjo	10.31	26,292,860
Kabupaten Wonogiri	10.14	18,967,943
Kabupaten Karanganyar	10.44	26,810,152
Kabupaten Sragen	11.53	25,614,300
Kabupaten Grobogan	9.6	12,576,682
Kabupaten Blora	10.04	16,256,238
Kabupaten Rembang	10.67	18,971,504
Kabupaten Pati	10.7	21,339,110
Kabupaten Kudus	9.85	87,169,030
Kabupaten Jepara	10.58	15,806,292
Kabupaten Demak	10.66	14,518,287
Kabupaten Semarang	11.05	30,901,153
Kabupaten Temanggung	10.66	18,144,047
Kabupaten Kendal	10.46	27,718,243
Kabupaten Batang	11	17,958,155
Kabupaten Pekalongan	10.39	16,200,916
Kabupaten Pemalang	10.39	11,937,566
Kabupaten Tegal	11.13	14,894,456
Kabupaten Brebes	11.33	15,893,671
Kota Magelang	10.08	45,198,530
Kota Surakarta	10.26	57,649,888
Kota Salatiga	10.71	45,218,650
Kota Semarang	10.68	67,414,109
Kota Pekalongan	10.96	22,100,245
Kota Tegal	9.77	37,954,947

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Diola*

Dari Tabel IV.2 diatas, maka dapat diketahui secara rinci hasil Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
Kabupaten Cilacap	II	II	I	II	II	II
Kabupaten Banyumas	III	III	IV	III	III	III
Kabupaten Purbalingga	III	III	IV	III	III	III
Kabupaten Banjarnegara	III	III	III	III	III	III
Kabupaten Kebumen	III	III	IV	III	III	III
Kabupaten Purworejo	III	III	IV	IV	IV	III
Kabupaten Wonosobo	III	III	IV	IV	IV	IV
Kabupaten Magelang	III	III	III	III	III	III
Kabupaten Boyolali	III	III	III	III	III	III
Kabupaten Klaten	III	III	IV	III	III	III
Kabupaten Sukoharjo	I	I	II	II	II	I
Kabupaten Wonogiri	IV	III	IV	III	III	III
Kabupaten Karanganyar	I	II	II	II	II	I
Kabupaten Sragen	III	I	II	I	I	I
Kabupaten Grobogan	IV	III	IV	IV	III	IV
Kabupaten Blora	III	IV	III	III	IV	IV
Kabupaten Rembang	III	III	III	III	IV	III
Kabupaten Pati	III	III	III	IV	IV	III
Kabupaten Kudus	II	I	I	I	II	II
Kabupaten Jepara	IV	III	IV	III	III	III
Kabupaten Demak	IV	III	III	IV	III	III
Kabupaten Semarang	I	I	I	I	I	I
Kabupaten Temanggung	III	III	III	III	III	III
Kabupaten Kendal	I	I	II	I	I	I
Kabupaten Batang	III	III	III	III	III	III
Kabupaten Pekalongan	III	III	IV	IV	III	III
Kabupaten Pemalang	IV	III	III	III	III	III
Kabupaten Tegal	III	III	III	III	III	III
Kabupaten Brebes	III	IV	III	III	III	III
Kota Magelang	I	I	II	II	II	I
Kota Surakarta	I	I	II	II	II	I
Kota Salatiga	I	I	II	I	II	I
Kota Semarang	I	I	II	I	I	I
Kota Pekalongan	III	III	III	IV	III	III
Kota Tegal	I	II	II	II	II	II

3.1.2. Analisis Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson. yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestik bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Tingkat ketimpangan pada provinsi ini diukur dengan Indeks Williamson. Adapun kriteria indeks Williamson secara detail yaitu besarnya IW adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW=0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mendekati merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah. Hasil perhitungan tingkat ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel IV.5.

Tabel IV. 5
Indeks Williamson Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Indeks Williamson					
Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	0.121	0.110	0.111	0.107	0.105
Kabupaten Banyumas	0.073	0.072	0.072	0.072	0.068
Kabupaten Purbalingga	0.090	0.088	0.089	0.086	0.084
Kabupaten Banjarnegara	0.135	0.135	0.133	0.129	0.126
Kabupaten Kebumen	0.164	0.159	0.160	0.152	0.145
Kabupaten Purworejo	0.089	0.087	0.087	0.087	0.086
Kabupaten Wonosobo	0.102	0.102	0.107	0.107	0.107
Kabupaten Magelang	0.120	0.119	0.119	0.117	0.116
Kabupaten Boyolali	0.056	0.055	0.053	0.050	0.046
Kabupaten Klaten	0.055	0.051	0.052	0.048	0.045
Kabupaten Sukoharjo	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001
Kabupaten Wonogiri	0.071	0.067	0.065	0.063	0.062
Kabupaten Karanganyar	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
Kabupaten Sragen	0.008	0.006	0.006	0.003	0.000
Kabupaten Grobogan	0.220	0.216	0.218	0.223	0.216
Kabupaten Blora	0.099	0.100	0.099	0.097	0.098
Kabupaten Rembang	0.055	0.053	0.052	0.050	0.052
Kabupaten Pati	0.049	0.045	0.042	0.044	0.043
Kabupaten Kudus	0.108	0.109	0.109	0.110	0.109
Kabupaten Jepara	0.122	0.121	0.123	0.125	0.126
Kabupaten Demak	0.150	0.147	0.146	0.149	0.145
Kabupaten Semarang	0.025	0.026	0.026	0.025	0.025
Kabupaten Temanggung	0.067	0.068	0.067	0.067	0.065
Kabupaten Kendal	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009
Kabupaten Batang	0.070	0.070	0.070	0.069	0.067
Kabupaten Pekalongan	0.100	0.101	0.101	0.101	0.099
Kabupaten Pemalang	0.244	0.241	0.238	0.233	0.228
Kabupaten Tegal	0.165	0.163	0.159	0.156	0.150
Kabupaten Brebes	0.157	0.160	0.155	0.148	0.139
Kota Magelang	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Kota Surakarta	0.067	0.067	0.068	0.067	0.067
Kota Salatiga	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030
Kota Semarang	0.136	0.136	0.135	0.136	0.136
Kota Pekalongan	0.020	0.018	0.017	0.017	0.017
Kota Tegal	0.027	0.027	0.026	0.026	0.026
Provinsi Jawa Tengah	0.671	0.659	0.658	0.654	0.642

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)* diolah

3.2. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian selama tahun penelitian 2011-2015 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian di atas diketahui bahwa tingkat pertumbuhan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah fluktuatif selama tahun penelitian 2011-2015 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2012. Ada beberapa daerah dengan nilai rata-rata pendapatan perkapita serta nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang lebih kecil dari nilai rata-rata pendapatan perkapita serta nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dan ada beberapa daerah yang dengan nilai rata-rata pendapatan perkapita serta nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang lebih kecil dari nilai rata-rata pendapatan perkapita serta nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis Indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson, yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah Menurut Sjafrizal (2008:107) indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestikbruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Tingkat ketimpangan pada provinsi ini diukur dengan Indeks Williamson. Adapun kriteria indeks Williamson secara detail yaitu besarnya IW adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW=0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Berdasarkan perhitungan tersebut maka penelitian di atas yang tingkat ketimpangan pendapatan rata-rata 0,6 maka tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah cukup tinggi karena tingkat ketimpangan pendapatan di atas 0,5 beberapa wilayah atau kabupaten/kota yang menyebabkan ketimpangannya tinggi adalah kota Semarang.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bimbin, Denis Jackson (2013) berjudul "Analisis Ketimpangan Pembangunan

Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan terhadap analisis data di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 sebesar 10,06%. Dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 11,133% dan laju pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2012 sebesar 8,41%. Selama periode 2011-2015 Kabupaten Sragen merupakan Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 11,53% sedangkan laju pertumbuhan terendah yaitu sebesar 5,74% yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen menurut pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, yang termasuk dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Daerah berkembang cepat adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Pekalongan. Kemudian daerah yang masuk dalam daerah maju tapi tertekan adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus dan Kota Tegal. Selanjutnya kabupaten/kota yang masuk dalam daerah tertinggal adalah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.
2. Pada periode pengamatan 2011-2015 dan dengan menggunakan Indeks Williamson, angka ketimpangan pada awal periode cenderung terjadi penurunan. Indeks Williamson dengan angka diatas 0,4 menunjukkan bahwa

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah masuk dalam wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, tingginya ketimpangan ini salah satunya di sebabkan oleh konsentrasi aktivitas ekonomi di salah satu wilayah yaitu pada Kota Semarang.

3. Pembuktian hipotesa Kuznets tentang kurva U-terbalik di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa kurva cenderung mengarah ke atas (distribusi pendapatan cenderung membaik) yang artinya hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif sedangkan ketimpangan pendapatan terus menurun.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diambil beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait khususnya di kabupaten/kota, adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat mengarahkan atau memprioritaskan perencanaan pembangunan bagi daerah yang relatif tertinggal dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, setiap daerah sudah seharusnya meningkatkan sikap kompetitif dengan daerah lain supaya setiap daerah mampu bersaing dalam meningkatkan kemampuan daerahnya masing-masing dan dapat menjalin kerjasama yang baik.
2. Pemerintah daerah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan regional dengan cara memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan di daerah untuk mendukung pembangunan di tingkat yang lebih rendah, serta dengan mengikis berbagai hambatan dalam upaya penanaman modal.
3. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan PDRB tanpa harus memperbesar ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memelopori dan memfasilitasi lembaga-lembaga usaha yang padat karya

sehingga pengembangan ekonomi dapat berorientasi pada terciptanya perluasan lapangan kerja.

4. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama dengan setiap kabupaten harus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakatnya dan etos kerja penduduknya. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan pendapatan investasi. Dengan adanya peningkatan kualitas masyarakat dan pemerataan ekonomi melalui kerjasama antar wilayah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2005. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akai, Nobuo dan Masayo Sakata. 2005. *Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence fram Statel-level Cross-sectional Data for the United States*. CIRJE-F-315. Diakses dari <http://www.e.utokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html> pada 12 Desember 2017.
- Arsyad, Lincolin. 2009. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi*
- Bimbin, Denis Jackson. 2013. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.” *e-journal uajy*. diunduh dari: <http://e-journal.uajy.ac.id/4854/1/0EP17048.pdf> pada 12 Desember 2017.
- Bonet, J. 2006. *Regional Economic Diparities in Colombia. Investigaciones Regionales*, 14-Paginas 61 a 80.
- Case, Karl E., Ray C. Fair., and Sharon M. Oster. 2012. *The Principles of Macroeconomics 10th Edition*. New York: Prentice-Hall, Inc.
- Caska & RM. Riadi. 2014. “Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau.” *e-journal unsyiah*, diunduh dari: <http://www.cs.unsyiah.ac.id/~frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/Jurnal%20Pertumbuhan%20dan%20Ketimpangan.pdf> pada 12 Desember 2017
- Dellis, Arman., Rosmelli., dan Novitasari. 2011. “Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990 – 2008.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 4, No. 1 Juli 2011.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori. Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Erni Panca Kurniasih. 2013. “Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119

- Herwin Mopangga. 2011. “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo.” *Trikonomika Volume 10, No. 1*, Juni 2011, Hal. 40–51.
- Ida Ayu Indah Utami Dewi, Made Kembar Sri Budhi, dan Wayan Sudirman. 2014. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.” *Jurnal FE UNUD*.
- Irawan dan Suparmoko. M. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Ed 6. Jakarta: BPFE UGM.
- Jhingan, M. L. 2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Krinantiya, Narina. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta.” *Jurnal FE UNDIP*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2003, 27 - 45
- Lailatul Fitriyah dan Lucky Rachmawati. 2015. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur.” *JURNAL UNESA*.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Parkin, Michael. 2012. *Macroeconomics 10th Edition*. New York: Addison-Wesley.
- Ritonga, MT. dan Yoga Firdaus. 2007. *Ekonomi SMA Jilid 2*. Jakarta: Penerbit PT. Phibeta
- Sigalingging, Hotbin [editor]. 2008. Profil Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Permasalahannya. Diakses dari Internet : www.google.co.id, tanggal 19 September 2016.
- Sihombing, M. 2008. Pengembangan Wilayah Melalui Paradigma Perencanaan Partisipatif. *Wahana Hijau*. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan*

- Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2008. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Soebagyo, Daryono. 2007. Disparitas Pembangunan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Studi Kasus Di Daerah Sumbagsel. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sjafrizal. 2008. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, No 3 Tahun XXVI.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional : Teori & Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. 2006. *Economic Development*. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Trias Dewi Yunisti. 2012. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten." JURNAL FE UI.
- Widi Asih. 2015. "Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013." JURNAL FE UNY.